BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam mendapatkan dan memperoleh pijakan dan referensi ilmiah untuk penelitian ini, peneliti tidak hanya menggunakan referensi khusus dari keilmuan Hubungan Internasional, tetapi referensi dilihat juga dari bidang-bidang keilmuan lainnya. Peneliti menggunakan beberapa sumber dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama yaitu mengenai upaya Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi politik di Yunani. Salah satunya adalah Thesis S-2 *Rizky Musafir* pada tahun 2011, dengan judul *Faktor-faktor penghambat Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi dan politik di Yunani* (2008-2010). Dalam tulisan ini membahas tentang faktor-faktor penghambat Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi dan politik di Yunani, tetapi tidak membahas secara khusus tentang Peranan serta langkah-langkah pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, seperti penelitian yang akan penulis bahas secara mendalam.

Dalam karya ilmiah tersebut Musafir Rizky menarik sebuah kesimpulan mengenai faktor penghambat Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi dan politik di Yunani. Permasalahan ini sangat mempengaruhi negara-negara lain di Uni Eropa, karena disebabkan oleh hubungan antar negara anggota Uni Eropa yang terikat oleh mata uang *euro*. Dibalik keberhasilannya, Uni Eropa tak lepas dari kritik permasalahan internal yang dihadapinya, misalnya tingkat pertumbuhan

ekonomi yang tidak terlalu tinggi seperti yang diharapkan sebelumnya, peningkatan penduduk berusia lanjut dan imigran, serta penolakan konstitusi oleh masyarakat Perancis dan Belanda.

Rizky Musafir menjelaskan isu mengenai krisis ekonomi global dan pada akhirnya permasalahan krisis ekonomi di Yunani sebagai salah satu anggota Uni Eropa yang bersifat Internasional, karena dilakukan untuk dunia Internasional pula, terutama negara-negara yang tergabung sebagai anggota Uni Eropa. Permasalahan utamanya juga adalah bahwa permasalah ekonomi ini menyangkut kebijakan politis pula. Dalam skripsi ini, teori-teori yang digunakan oleh peneliti antara lain teori politik, organisasi, efektivitas kebijakan dan teori domino.

Tidak hanya merujuk pada karya ilmiah Rizky Musafir, namun peneliti juga mengambil beberapa karya ilmiah lain sebagai rujukan peneliti dari Tengku Iari Vehuliza tahun 2011, dengan judul *Krisis Eurozone*: *Kegagalan Kebijakan Moneter European Central Bank* (ECB) *Menjaga Stabilitas Finansial di Kawasan Eurozone*. Di dalam penelitian ini peneliti memaparkan awal kemunculannya krisis *Eurozone* di tahun 2010 merupakan salah satu kejadian besar di tahun 2010. Sebagai bentuk dari integrasi ekonomi dan moneter regional di kawasan Eropa yang selama ini menjadi kawasan percontohan bagi region lainnya terutama ASEAN, kini *Eurozone* mengalami tantangan yaitu terjadinya instabilitas finansial akibat terjadinya krisis utang Yunani di tahun 2009 dan diikuti krisis di empat negara lainnya pada tahun 2010, hingga kelima negara ini disingkat dengan PIIGS: *Portugal*, *Ireland*, *Italy*, *Greece* dan *Spain*. Di balik krisis ini, ECB sebagai Bank Sentral Eropa merupakan institusi yang memegang tanggung jawab

atas stabilitas finansial di kawasan *Eurozone* melalui *Common Monetary Policy*, sehingga kemunculan krisis ini mengidikasikan kebijakan moneter ECB telah gagal dalam menjaga stabilitas finansial di kawasan *Eurozone.* Kegagalan tersebut disebabkan oleh ECB sebagai bank sentral merupakan rezim yang tidak signifikan sehingga mempengaruhi kebijakan moneter yang dikeluarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ECB sebagai rezim tersebut ialah *Interest, Political Power, Norms/Principle, Usage/Customs* dan *Knowledge*.

Di dalam Jurnal Hubungan Internasional Volume VI, No. 1, Tahun 2013 oleh Indra Kusumawardhana Program Studi S2 Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga dengan tema *European Economic Crisis*: "Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Eropa". Di dalam jurnal ini Indra menjelaskan bagaimana krisis di Uni Eropa itu bisa terjadi yang diawali dengan, Krisis utang di zona *euro* telah membawa babak baru pada penanganan krisis. Krisis ini kembali memunculkan wacana mengenai eksistensi mata uang tunggal Eropa. Krisis yang bermula dari Yunani ini telah membawa hampir seluruh negara Uni Eropa pada krisis dan resesi. Selain itu, tulang punggung ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terhambat oleh krisis. Di tengah-tengah pertumbuhan integrasi ekonomi regional di Uni Eropa, institusi regional tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi krisis. Argumen utama pada studi ini adalah bahwa krisis ekonomi negara-negara Uni Eropa belum terselesaikan. Di sisi lain, kondisi integrasi ekonomi Uni Eropa mengalami peningkatan dan terdapat pula benturan kepentingan nasional diantara negara anggota utama seperti Jerman, Perancis dan Inggris. Benturan berbasis kedaulatan

mendorong pandangan yang dicetus oleh naiknya sentimen nasional dan membawa krisis ekonomi pada krisis politik dalam sejumlah negara anggota Uni Eropa.

Untuk referensi terakhir peneliti mencatumkan skripsi Reszki Anasias dari Universitas Sumatra Utara, Medan tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Peranan Uni Eropa dan *International Monetary Fund* Sebagai Organisasi Internasional Dalam Penanganan Krisis Uni Eropa". Di dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan dalam aspek hukum internasional bagaimana Peranan Uni Eropa dan IMF sebagai organisasi internasional dalam penanganan krisis di Uni Eropa. Latar belakang penelitian ini diawali dengan perkembangan kehadiran kerjasama bidang ekonomi yang bersifat regional-internasional, seperti Uni Eropa, tentu memberikan dampak terhadap tata hukum internasional serta tata hukum ekonomi global umumnya. Jika persoalan ini dibawa dalam konteks krisis ekonomi tentu dampak negatif yang laten dapat melanda seluruh aspek kehidupan dunia. Kesatuan mata uang negara-negara berdaulat ini menjadi penyebab prioritas merosotnya perekonomian dunia. Uni Eropa dilengkapi dengan sebuah parlemen dan sebuah bank sentral, yang menjalankan fungsi pemerintah pusat terkhusus kewenangan moneter *Euro*. Perspektif lain, keberadaan dan keterlibatan IMF selama hampir enam tahun menandai lenturnya hukum dasar Uni Eropa sebagai pemerintahan supranasional bagi negara anggotanya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan Uni Eropa dan IMF dalam tata hukum internasional, bagaimana anggaran dasar Uni Eropa yaitu *Lisbon Treaty* (Perjanjian Lisboa) itu sendiri mengatur mengenai

kewenangan Uni Eropa dalam penanganan krisis di wilayah Uni Eropa serta bagaimana kedudukan IMF sebagai organisasi keuangan internasional yang selama ini menangani krisis secara global dikaitkan dengan kewenangan Uni Eropa dalam penanganan krisis Uni Eropa.

Pada dasarnya baik Uni Eropa maupun IMF memiliki kedudukan di mata hukum internasional melalui kepemilikan personalitas hukum menurut anggaran dasarnya masing-masing. Personalitas ini juga yang memampukan kedua organisasi internasional ini melakukan hubungan hukum dalam penuangan perjanjian internasional berupa *Memorandum of Economic and Financial Policies* tanggal 3 Mei 2010 dalam rangka penanganan krisis Uni Eropa. Hanya saja, kapasitas dan kewenangannya masing-masing dibatasi oleh anggaran dasar dan perjanjian internasional. Tindakan dalam bentuk apapun yang melampaui ketentuan tersebut tidak dibenarkan. Oleh karena itu, sepanjang tetap taat terhadap perjanjian internasional diantara kedua organisasi internasional tersebut, maka tidak didapati kewenangan yang tumpang tindih.

Dari keempat referensi yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini, peneliti memiliki perbedaan pandangan serta mengspesifikasikan negara-negara yang terkena krisis ekonomi namun dalam hal ini pembahasan yang peneliti kerjakan lebih berfokus pada awal mula krisis ekonomi tersebut yang terjadi di Yunani dan bagaimana perkembangan ekonomi Yunani setelah mendapatkan bantuan dari Uni Eropa serta bagaimana peranan Uni Eropa dalam mengatasi krisis ini. Untuk membedakan penelitian ini peneliti membandingkan ke empat referensi tersebut dengan tabel sebagai berikut:

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas Negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan Negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-Negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-Negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2005:3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara Negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di Negaranya sendiri. Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing Negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari Negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi

berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:33-34).

Menurut penjelasan diatas, pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara saja, tetapi aktor lain seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional, dan aktor-aktor tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti Uni Eropa yang berperan dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, yang dimana Uni Eropa tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa ada kesepakatan dan kerjasama dari negara-negara anggota serta organisasi internasional.

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya.

Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*Intergovernmental Organization* / IGO) dan organisasi internasional Non-pemerintah (*Non-Governmental Organization* / NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) Organisasi: bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan Bidang Kegiatan: global-umum dan global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*) (Rudy, 2009:94-97).

Teuku May Rudi mendefinisikan organisasi internasional dalam bukunya "Administrasi dan Organisasi Internasional" sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda" (Rudy, 2009:3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas Negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009:3).

Uni Eropa atau *European Union* (EU) merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional di daratan Eropa. Organisasi yang sampai saat ini beranggotakan 28 negara resmi berdiri sejak ditandatanganinya Perjanjian Uni Eropa atau Perjanjian *Maastricht* tahun 1992. Uni Eropa juga telah dikenal sebagai organisasi regional yang paling kuat, bahkan sebagai organisasi internasional yang memiliki kekuatan supranasional terhadap negara anggotanya, memiliki tata pemerintahan sendiri yang terdiri dari berbagai institusi pelaksana dalam menjalankan peranan Uni Eropa di kawasan Eropa serta negara dunia ketiga.

2.2.2.1 Peranan Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota

tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya (Perwita dan Yani, 2005:29).

Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Eropa yang telah mencakup berbagai bidang, juga memiliki beragam bentuk kebijakan. Dimana pada awal pembentukannya, hanya bidang ekonomi dan politik sebagai *base dimention*. Lewat perkembangannya, Uni Eropa memperluas bidang cakupannya ke bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik luar negeri.

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu organisasi internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Bahkan saat ini organisasi internasional dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung, dimana kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat dunia untuk bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan.

Peranan organisasi internasional terbagi dalam 3 (tiga) kategori, adalah sebagai berikut :

1) Sebagai instrumen, yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2) Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya yang membahas dan membicarakan masalah masalah

yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun mengangkat masalah dalam negeri orang lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3) Sebagai aktor independen. organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita & Yani, 2005:95).

Jelas di atas bahwa suatu organisasi Internasional hanya bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan mengambil keputusan dari tubuh organisasi internasional terkait. Dengan demikian semakin jelas bahwa organisasi internasional merupakan *non-state actor* (Aktor Non Negara) yang mempunyai kedudukan dalam sistem internasional.

Peranan organisasi internasional saat ini telah menjadi aktor dalam kancah hubungan internasional, karena peranannya sebagai sebuah wadah atau instrumen bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti sebagaimana peranan Uni Eropa di Yunani yang menjadi mitra kerjasama pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi serta sebagai pemberi kebijakan di kawasan Eropa terhadap negara anggota Uni Eropa.

2.2.3 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerja sama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan,

pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000:45).

Menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2003:12)

Secara umum, kerjasama internasioanal ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu system perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.

4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000:45).

Uni Eropa adalah sebuah organisasi regional yang bekerjasama dalam bidang ekonomi diantara 28 negara anggota Eropa. Uni Eropa dibentuk untuk melakukan kerjasama ekonomi dan pencegahan perang. Saat ini hampir setengah abad telah tercipta keamanan dan kemakmuran yang membantu peningkatan hidup dalam standar, dimulai dari mata uang yang sama diantara negara Eropa, dan kemudian secara progresif membangun pasar yang luas di seluruh negara di benua Eropa seolah sebuah negara besar. Hal itu menimbulkan ketergantungan perekonomian yang besar antar negara-negara Eropa. Hal ketergantungan tersebutlah yang merupakan sebuah aspek dari Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh negara-negara anggota negara UE.

2.2.4 Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri, secara umum bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana.

Menurut Sukirno dalam Perwita dan Yani, bahwa bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Setidaknya terdapat dua syarat aliran modal luar negeri yang merupakan bantuan luar negeri:

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan.
2. Aliran modal dari luar negeri tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan dari pada yang berlaku dalam pasar Internasional (Perwita & Yani, 2005:83).

Menurut Michael Todaro dalam buku Yanuar Ikbar, bantuan luar negeri adalah yang meliputi semua pinjaman konsesional (suku bunga dan jangka pembayaran kembali modal yang dipinjamkan secara lunak dibandingkan dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman komersial) dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang, mengalihkan sumber-sumber dari negara kayak ke negara dunia ketiga dengan tujuan untuk pembangunan atau pemerataan pendapatan.

Bantuan luar negeri merupakan tindakan ekonomi yang memiliki sifat dan efektifitas yang berbeda dibandingkan diplomasi dan propaganda. Apapun pengertian mengenai bantuan luar negeri menurut Yanuar Ikbar yaitu:

> "Bantuan luar negeri (*foreign aid*) diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-lembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu" (Ikbar, 2007:188).

Program bantuan luar negeri ini bersifat saling menguntungkan. Pihak penerima memperoleh bantuan baik itu berupa dana, perlengkapan, maupun pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Saat ini masalah-masalah pembangunan

dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Teknik pemberian bantuan dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (*government to government*) atau melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan *World Bank*.

Terdapat empat motivasi dar negara para pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya:

1. Motivasi kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi.
2. Motivasi politik yang merumuskan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara donor.
3. Motivasi keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motivasi keamanan memiliki sisi ekonomi.
4. Motivasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (Perwita & Yani, 2005:84).

UE mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara anggotanya yang belum maju dan juga kepada negara-negara berkembang, meskipun prioritasnya ditekankan pada bantuan terhadap negara miskin. Namun di dalam kasus krisis Ekonomi, UE lebih intensif dalam

menjalankan program bantuan luar negerinya baik berupa Pinjaman, Hibah serta Utang, terutama ketika kawasan Eropa terkena dampak krisis ekonomi global yang memberikan dampak buruk terhadap negara anggota Uni Eropa itu sendiri, yang diawali dengan Yunani, Portugal, Spanyol, Irlandia dan Itali. Maka dari itu tanggung jawab UE memberikan bantuan ekonomi kepada negara anggotanya.

2.2.5 Regionalisme

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel dalam "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", mendefinisikan :

> "Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan" (Perwita & Yani, 2005:104).

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi kedalam dua tingkat, tingkat pertama disebut sebagai integrasi dangkal (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa integrasi dalam

(*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:110).

Uni Eropa adalah organisasi regional yang dibentuk negara-negara yang ada dalam kawasan benua Eropa. Ini sejalan dengan salah satu syarat anggota Uni Eropa yaitu negara yang bersangkutan secara geografis harus berada dalam lingkup benua Eropa. Dari segi budaya, negara-negara Eropa pada umumnya memiliki budaya yang seragam yaitu budaya liberalis-kapitalis. Hal inilah yang mendorong negara menjalin kerjasama dengan negara Eropa lainnya lewat perdagangan antarnegara karena setiap negara saling membutuhkan. Atas dasar itulah negara-negara Eropa membentuk suatu organisasi regional bernama *European Union* (EU) atau Uni Eropa.

Uni Eropa dibentuk oleh keenam negara pemrakarsanya untuk memperkuat ekonomi dan politik regionalnya. Hal itu ditempuh dengan jalan mengintegrasikan negara-negara yang berada dalam satu kawasannya salah satunya dengan mata uang *euro*. Di luar krisis ekonomi yang sedang melanda kawasan ini, kehadiran Uni Eropa sejak berdirinya memang dikagumi oleh dunia baik dari segi ekonomi

maupun politiknya yang begitu tangguh dibandingkan organisasi regional lainnya. Prestasi ini didapatkan tentunya dengan saling mendukung di antara sesama negara anggota.

Terbentuknya Uni Eropa merupakan bukti nyata adanya regionalisme dalam hubungan internasional. Satu lagi organisasi regional yang merupakan organisasi regional pertama yaitu NAFTA *(North American Free Trade Agreement)*. Kedua kerjasama inilah yang menjadi cikal bakal kerjasama regional kemudian diikuti oleh pembentukan organisasi-organisasi regional lainnya seperti ASEAN di Asia Tenggara dan MERCOSUR di Amerika Latin.

2.2.6 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional mulai menjadi kajian dalam studi Hubungan Internasional sejak tahun 1970-an. Dimana pada saat itu negara-negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang disebabkan oleh pemboikotan pasokan minyak bumi oleh negara-negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di dunia, hal ini menjadi awal timbulnya kesadaran kepada para pemegang otoritas pemerintahan akan pentingnya faktor ekonomi yang menentukan proses politik, begitupun juga sebaliknya. Sehingga eksistensi antara negara dan pasar keduanya tidak dapat dipisahkan.

Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional. Ekonomi-politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Menurut Robert Gilpin yang

dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" mendefinisikan, bahwa ekonomi-politik adalah dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (Perwita & Yani, 2005:76).

Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (monodisiplin). Artinya, implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interpedensi, depedensi, keterbelakangan pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan *power politics, realism,* dan *idealism, linier* dan strukturalis internasional, globalisasi, atau *regionalism,* dan lain-lain (Ikbar, 2002:21).

Joan E. Spero mengemukakan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami ekonomi-politik internasional, ia menyatakan bahwa :

> "Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan "*who gets what, when and how ?*". Ekonomi internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi-politik internasional" (Perwita dan Yani, 2005:76).

Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik dengan ekonomi internasional setiap negara atau sebaliknya atau studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional terhadap politik domestik negara-negara tertentu misalnya

yang berada dalam satu regional seperti negara-negara Uni Eropa. Ekonomi terkait dengan penciptaan dan pendistribusian kekayaan, sedangkan politik terkait dengan penciptaan dan pendistribusian kekuasaan.

Bila dikaitkan dengan apa yang terjadi di Yunani pada tahun 2009. Negara ini dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada ketidakstabilan sosial, politik, dan tentunya bagi perekonomian. Di luar dampak mikro ekonomi, krisis tersebut mengancam akuntabilitas Uni Eropa dan utamanya *euro*. Permasalahan yang muncul sekarang ialah negara-negara anggota Uni Eropa mulai meragukan akuntabilitas *euro*. Salah satunya Italia yang tidak akan ragu untuk meninggalkan *euro* guna kembali ke *lyra*. Sikap Italia mencerminkan bahwa setiap negara akhirnya harus mengandalkan dirinya sendiri.

2.2.7 Teori Krisis Ekonomi

Kondisi krisis ekonomi di suatu negara atau wilayah bisa berasal dari luar atau dari dalam negara/wilayah tersebut. Dari dalam, misalnya, terjadi suatu penurunan produksi komoditas tertentu secara mendadak. Sedangkan dari luar, misalnya, terjadi dari negara tertentu yang memberi imbas pada negara lain karena terjadi hubungan kebutuhan ekonomi. Krisis ekonomi mempunyai proses atau jalur-jalur transmisi dampak yang berbeda, dan sektor-sektor ekonomi yang terkena dampak pun berbeda-beda. Tergantung besarnya keterkaitan-keterkaitan produksi, konsumsi, dan investasi dari sektor-sektor tersebut.

Tambunan (2011:4) membahas sejumlah tipe-tipe krisis ekonomi yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia.

1. Krisis Perbankan: Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan. Pada fase kedua, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan dalam pembiayaan-pembiayaan kegiatan produksi/bisnis mereka. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan karena perbankan sendiri mengalami kekurangan likuiditas. Atau juga perusahaan-perusahaan masih bisa mendapat pinjaman, tetapi dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi dari keadaan normal. Akibat selanjutnya dari krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akibat lain dari ini, misalnya adalah kehilangan sejumlah uang tabungan, misalnya diatas ketentuan lembaga penjamin simpanan (Tambunan, 2011:7).
2. Krisis Nilai Tukar: Krisis ini terjadi jika sebuah mata uang mengalami perubahan/penurunan/depreseasi yang sangat besar dan berlangsung mendadak terhadap mata uang lain. Misalnya rupiah atas dollar AS. Dampak yang dirasakan langsung adalah aktivitas ekspor dan impor. Depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lain akan membuat daya saing harga dari produk-produk buatan negara yang mata uangnya tidak terdepresiasi, mengalami volume kenaikan ekspor.

> Kenaikan volume ekspor menambah volume produksi dan meningkatnya jumlah kesempatan kerja. Di sisi impor, misalnya, jika kurs rupiah melemah dari nilai tukar yang biasanya Rp. 8.000 per satu dollar menjadi Rp. 20.000 per satu dollar, maka akan membuat hargaharga dalam rupiah di pasar dalam negeri dari produk-produk impor akan naik, yang bahkan bisa mengakibatkan meningkatnya laju inflasi. Dalam tipe krisis ekonomi ini, jalur-jalur transmisi kuncinya adalah perubahan dalam volume ekspor dan impor (Tambunan, 2011:10-14).

Bila dikaitkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Uni Eropa dan Yunani, dapat disimpulkan bahwa Krisis utang (yang dimana Yunani sebagai negara yang terkena dampak krisis ekonomi paling buruk melakukan peminjaman dana kepada Bank Sentral Eropa untuk mengantisipasi krisis ini berkepanjangan, namun pemerintah mengabaikan langkah-langkah yang diberikan oleh ECB sehingga dana yang dipinjam oleh pemerintah dianggap sebagai hutang oleh ECB) dan nilai tukar yang melanda zona Eropa menjadi babak baru ekonomi negara-negara Eropa menuju resesi. Krisis ini pada perkembangannya melanda hampir seluruh negara-negara Eropa pengguna mata uang Euro. Krisis yang berawal dari kredit macet di Yunani yang kemudian berdampak luas bagi negara-negara Eropa lain. Negara-negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terkena imbas dari krisis tersebut. Euro kemudian tertekan dan mengakibatkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara di zona Euro.